



Rencana Strategis **RENSTRA**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman 2016-2021



**Pemerintahan Kab. Pasaman
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. A. Yani No. 38 Lubuksikaping
KABUPATEN PASAMAN
2016**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman.

Seiring dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman perlu menyelaraskan dokumen lima tahunan OPD yaitu Renstra yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya Renstra ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman untuk tahun-tahun yang akan datang.

Kepada Tim Penyusun Revisi Renstra kami ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya sehingga Revisi Renstra ini dapat diselesaikan. Akhir kata, kritikan dan saran dari pembaca kami harapkan untuk kesempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Lubuk sikaping, Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Kabupaten Pasaman

Drs. H. ASARI, M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR ISI		vi
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1	Latar belakang	1
1.2	Landasan hukum	3
1.3	Maksud dan tujuan	5
1.4	Sistematika penulisan	7
BAB II GAMBARAN DAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		10
2.1	Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10
2.2	Sumber daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25
2.3	Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27
2.4	Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI		36
3.1	Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36
3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	42
3.3	Telaah Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Propinsi	44
3.4	Telaah tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis	46
3.5	Penentuan isu – isu strategis	47
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN		

	4.1	Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50
	4.2	Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	52
	BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF		61
	BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		64
	BAB VII. PENUTUP		67
	LAMPIRAN		
	L-1	Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman No.800/02A/DISDIKBUD -2017 tentang Tim Penyusun RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Periode 2016-2021	69
	L-2	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Pendidikan Nasional seperti diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pendidikan merupakan salah satu unsur utama penentu kemajuan pembangunan. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan kebudayaan secara global menuntut harus tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Peranan pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas harus terencana dan terprogram dengan baik dalam rangka persiapan menghadapi kemajuan disegala lini aspek kehidupan saat ini.

Janji kemerdekaan, amanat konstitusi, Nawacita serta kondisi terkini menjadikan sinergi pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan sebagai pilihan yang memiliki alasan kuat untuk dijadikan prioritas pembangunan Nasional. Hal di atas dijadikan pedoman penyusunan rencana startegis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dan secara berurutan dapat dijadikan pedoman penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di daerah.

Program Nasional terkait di bidang pendidikan tetap mengacu pada 4 program strategis yaitu peningkatan mutu pendidikan, peningkatan pemerataan pendidikan, peningkatan efisiensi pendidikan dan relevansi pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dengan tetap mengupayakan penuntasan program rintisan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun.

Prioritas Pembangunan bidang pendidikan Kabupaten Pasaman mengacu kepada upaya penuntasan permasalahan yang tengah dihadapi berupa: (1) Belum maksimalnya pemanfaatan layanan pendidikan di semua jenjang pendidikan, (2) persentase lama rata-rata sekolah yang masih belum memadai, (3) Rendahnya mutu dan daya saing lulusan yang terlihat dari jumlah lulusan SMA/SMK/MA yang diterima di Perguruan Tinggi maupun yang diterima di dunia industri, (4) belum optimalnya tata kelola pendidikan dalam menciptakan iklim dan motivasi belajar, (5) belum meratanya pendistribusian, pemerataan dan kualitas guru di setiap jenjang pendidikan, (6) belum optimalnya Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD), (7) keadaan infrastruktur dan sarana pendidikan yang masih membutuhkan pembenahan dan pengembangan, (8) beberapa indikator dari Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum mencapai standar nasional pendidikan, (9) belum optimalnya penanganan kesiswaan dalam pembentukan karakter agamis dan berbudaya (10) Pengelolaan dan pengembangan asset budaya baik fisik dan nonfisik masih belum terdata dengan sempurna.

Upaya penuntasan permasalahan pendidikan dan program kegiatan yang belum tercapai pada tahun-tahun sebelumnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman, untuk tahun 2016 - 2021 membutuhkan perencanaan program dalam bentuk Rencana Strategis yang dituangkan dalam Visi Pendidikan

dan Kebudayaan sebagai berikut : ***Terwujudnya Insan Pasaman yang Cerdas, Berakhlak dan Berdaya Saing.***

Arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman dalam mendukung program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap III Tahun 2016-2021. Kabupaten Pasaman diupayakan berjalan sinergis dan berkesinambungan dengan harapan cita-cita yang diamanahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman dapat tercapai secara maksimal.

Implementasi arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman dalam rangka mewujudkan pencapaian program Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai pilar pendidikan di Indonesia, untuk tahun 2016-2021, disusunlah Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021. Secara teknis penyusunan dan penyajian rencana strategis ini dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, rencana strategis ini akan dijadikan pedoman dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Tahun 2016 -2021, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi dan , Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan;

9. P
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan;
10. P
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. P
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. P
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008;
13. P
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
14. P
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. P
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. P
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasaman Tahun 2005-2025.

17. P
eraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 Tentang RTRW
Kabupaten Pasaman.
18. P
eraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD
Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021.
19. P
eraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan
Agropolitan kabupaten Pasaman.

1.3. M

aksud dan Tujuan

Renstra ini merupakan dokumen induk perencanaan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman. Sebagai dokumen induk, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman harus dijadikan rujukan oleh pimpinan/pejabat Dinas dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit pelaksana teknis yang ada dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman 2016 – 2021 adalah untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi organisasi, sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja yang pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.

b. T

ujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman antara lain sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sejumlah permasalahan pendidikan di Kabupaten Pasaman yang diperkirakan menghambat pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman dalam mewujudkan ***Insan Pasaman yang cerdas, berakhlak dan berdaya saing***.
2. Mendapatkan gambaran tentang kondisi, potensi dan ketersediaan sumber daya bidang pendidikan di Kabupaten Pasaman, sehingga mampu mengoptimalkan potensi yang ada dan mengalokasikan sumber daya serta dana secara lebih efektif dan efisien.
3. Menyusun program kegiatan dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
4. Membangun agenda dan kegiatan yang sistematis guna mendukung dan mengimplementasikan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Pasaman ke dalam sejumlah langkah dan kegiatan yang lebih operasional dan implementatif.

1.4.

istematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *stakeholders* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan renstra.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pasaman

Tahun 2016-2021, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021. Legalisasi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar belakang
 - 1.2. Landasan hukum
 - 1.3. Maksud dan tujuan
 - 1.4. Sistematika penulisan
2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 - 2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
 - 2.2. Sumber daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
 - 2.3. Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
 - 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
 - 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman

- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaah renstra K/L dan renstra Provinsi
- 3.4. Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
- 3.5. Penentuan isu-isu strategis
4. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
 - 4.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
 - 4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
 - 4.3. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
5. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
6. BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
7. BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN

2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman adalah tipe **A** dengan Susunan Organisasi Sebagai Berikut:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Bina Program
 3. Sub bagian keuangan
- c. Bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Non formal, terdiri dari:
 1. Seksi kurikulum dan penilaian.
 2. Seksi kelembagaan dan sarana prasarana
 3. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter
- d. Bidang pembinaan pendidikan dasar, terdiri dari:
 1. Seksi kurikulum dan penilaian.
 2. Seksi kelembagaan dan sarana prasarana
 3. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter
- e. Bidang Kebudayaan terdiri dari:
 1. Seksi cagar budaya dan museum
 2. Seksi sejarah dan tradisi
 3. Seksi kesenian dan tenaga kebudayaan
- f. Seksi pembinaan Ketenagaan.
 1. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal.
 2. Seksi PTK Sekolah Dasar
 3. Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama

g. Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
tercantum dalam lampiran dokumen ini.

Tugas pokok dan fungsi setiap unsur adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Tugas :

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendidikan dan kebudayaan

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan kebudayaan
- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

B. Kelompok Sekretariat

Tugas:

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.

Fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan

- serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - h. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - i. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - j. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.

C. Kelompok Bidang

1) Kelompok Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, melaksanakan tugas dan fungsi:

Tugas:

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan

- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

2) Kelompok Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, melaksanakan tugas dan fungsi:

Tugas:

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; .
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten.

- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

3) Kelompok Bidang Kebudayaan, melaksanakan tugas dan fungsi:

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

Fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten.
- b. pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- c. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan
- d. cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten.
- e. pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- f. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- g. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- h. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;

- i. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- j. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- k. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- l. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
- m. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
- n. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- o. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- p. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.

4) Kelompok Bidang Pembinaan Ketenagaan, melaksanakan tugas dan fungsi:

Tugas:

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah

menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- f. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
- h. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah

menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

D. Kelompok Subbagian

Kelompok Sekretariat, terdiri atas:

1) Subbagian Bina Program, melaksanakan tugas:

- a. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan,;
- b. pengelolaan data dan informasi;
- c. penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan, ; dan
- e. penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas:

- a. urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan; dan
- b. koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan.

3) Subbagian Keuangan

- a) pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengelolassn administrasi keuangan
- b) pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan admnistrasi keuangan
- c) penyusunan rencana, penyiapan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran , koordinasi

penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan dan serta penyusunan laporan keuangan

- d) pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan

E. Kelompok Seksi

1. Kelompok Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:

a) Seksi Kurikulum dan Penilaian, melaksanakan tugas:

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 2) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
- 3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- 5) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, melaksanakan tugas:

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- 3) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- 5) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, melaksanakan tugas:

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 2) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- 4) pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

2) Kelompok Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri atas:

a) Seksi Kurikulum dan Penilaian, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- (2) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (4) penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
- (5) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- (6) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (3) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (5) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan

pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- (2) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- (4) pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

3) Kelompok Bidang Kebudayaan, terdiri atas:

a) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, melaksanakan tugas:

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- 2) penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- 3) penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- 4) penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
- 5) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman; dan
- 6) pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman.

b) Seksi Sejarah dan Tradisi, melaksanakan tugas:

- (1) melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- (2) penyusunan bahan pelestarian tradisi;
- (3) penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
- (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
- (5) pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.

c) Seksi Kesenian dan tenaga kebudayaan melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- (2) penyusunan bahan pembinaan kesenian;
- (3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian; dan
- (4) pelaporan di bidang pembinaan kesenian.

4) Kelompok Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas:

a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (2) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- (3) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- (5) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (2) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (3) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- (5) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

c) Seksi Tenaga Kebudayaan, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan

- permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- (2) penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- (3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan
- (4) pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.

2.2. Sumber daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.

Kondisi sumber daya manusia bidang pendidikan di Kabupaten Pasaman ditemui masih kurang meratanya penempatan guru di setiap sekolah, masih diperlukan peningkatan dan pembinaan kompetensi guru dalam pemenuhan Standar Kompetensi untuk melaksanakan tugas pembelajaran. Berbagai program telah dilakukan dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan berkaitan dengan sumber daya manusia berupa Uji Kompetensi Guru, Sertifikasi dan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Berbagai prestasi pun telah diperoleh selama rentang waktu tersebut berupa Olimpiade Sains Guru dan Guru berprestasi.

Tabel II.1. Jumlah PNS Berdasarkan golongan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

(sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2015)

No	Uraian	Jumlah
1	Gol I	-
2	Gol II	3
3	Gol III	36
4	Gol IV	40

Sedangkan jumlah Guru dan Tenaga kependidikan yang merupakan ujung tombak dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman sebanyak 4120 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II. 2. Keadaan Guru Kabupaten Pasaman tahun 2015 disetiap jenjang
(sumber dapodik 2015)

No	Jenjang	Kualifikasi Pendidikan				Ket
		< S1	S1	S2	>S2	
1	TK					
2	SD	204	2388	43		
3	SLTP	57	798	23		
4	SMA	6	493	42		
5	SMK	5	246	18		
Total		272	3925	126		

Tabel II.3. Jumlah Guru Berdasarkan Status Kepegawaian
(sumber Pasaman dalam Angka 2016)

No	Jenjang	STATUS KEPEGAWAIAN		TOTAL
		PNS	NON PNS	
1	TK/PAUD	87	123	767
2	SD	1.767	891	2658
3	SLTP	645	101	733
4	SMA	308	68	348
5	SMK	147	45	171
Total		2.906	1228	4120

Tabel II.4. Jumlah Penduduk Usia Sekolah
(sumber Pasaman dalam Angka 2016)

No	PENDUDUK USIA SEKOLAH		KEADAAN SISWA	
	USIA	JUMLAH	SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Usia 4-6 Tahun	12.392	TK/TPA/KB	8.003

2	Usia 7-12 tahun	34.677	SD/MI	41.876
3	Usia 13-15 Tahun	15.941	SMP/Mts	20.872
4	Usia 16-18 Tahun	14.765	SMA/SMK/MA	19.134

Tabel II.5. Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas
(sumber Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

No	SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH SEKOLAH	RUANG KELAS			
			JUMLAH	BAIK	R. RINGAN	R. BERAT
1	TK/PAUD	97				
2	SD	244	1.850	502	1.114	128
3	SMP	38	410	141	229	7
4	SMA	13	199	57	132	4
5	SMK	7	115	83	27	4
JUMLAH		289	2574	783	1502	143

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.

Berbagai terobosan dalam capaian target kegiatan 2011 – 2015 seperti pencapaian Standar Nasional Pendidikan, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, implementasi kurikulum, pengembangan kegiatan kesiswaan, program sertifikasi guru, penuntasan program wajib belajar 9 tahun beserta fasilitas penuntasannya tetap menjadi prioritas utama di samping melakukan perbaikan pada program pendidikan gratis dan Program Satu PAUD Satu Jorong di Kabupaten Pasaman. Berikut kondisi pendidikan dan kebudayaan pada periode 2011 – 2015 :

a. Pendidikan Usia Dini

Selama periode 2011 – 2015 Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan pada waktu tersebut bekerjasama dengan masyarakat disetiap jorong dan nagari telah mampu menggalakkan berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang selama ini lebih populer di daerah ibu kecamatan. Keberadaan lembaga PAUD di Kabupaten Pasaman di akhir 2015 hampir seluruh jorong telah memiliki lembaga ini tercatat pada tahun 2015 telah terdaftar sebanyak 297 dari 212

orong ada Angka Partisipasi Kasar 43,11 % dengan jumlah peserta didik 8003 orang dan guru 767 orang. Pesatnya perkembangan PAUD ini merupakan dukungan program pemerintah kabupaten Pasaman pada tahun 2013 dengan telah dicanangkan Program Satu Paud Satu Jorong.

Jenjang pendidikan yang masih dikategorikan kelompok PAUD adalah Taman Kanak Kanak, perkembangan dan capaian target yang terjadi diakhir periode 2011 – 2015 di Kabupaten Pasaman diawal periode 2011 – 2015 terdapat 58 sekolah dengan jumlah siswa 2188 orang, guru 252 orang dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) 15.55 %. Pada tahun 2015 jumlah siswa 2315 orang, guru 196 orang dengan APK sebesar 16.33 %, hal ini menunjukkan perkembangan APK meningkat sebesar 1,22 %, pengurangan jumlah guru dikarenakan terjadinya efisiensi kebutuhan guru di setiap sekolah dimana rasio guru dan siswa pada jenjang Taman Kanak Kanak adalah 1 : 15

b. Pendidikan Dasar

Penuntasan Program Wajib Belajar 9 tahun jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menjadi prioritas di jajaran dunia pendidikan baik secara Nasional maupun Daerah. Ketercapaian program penuntasan pendidikan dasar di Kabupaten Pasaman pada jenjang Sekolah Dasar pada tahun 2015 telah mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) 100,30 %, Angka Partisipasi Murni (APM) 95,60 %, jumlah Sekolah Dasar dan MI 244 sekolah yang terdiri dari 241 Sekolah Dasar dan 3 madrasah Ibtidayah, sedangkan jumlah guru berjumlah 3237 orang dan siswa 42218 orang yang menunjukkan rasio guru dan siswa adalah 1 : 13 orang. Pada jenjang SMP/MTs dan Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) 97,06 %, Angka Partisipasi Murni 85,90 % dengan jumlah sekolah 37 SMP, 15 MTs dan jumlah Guru 1182 orang, siswa 9823 Orang menunjukkan Rasio Guru terhadap siswa 1 : 18

Keadaan terkini Sarana Prasarana pada setiap jenjang pendidikan adalah 6,3 % sarana pra sarana SD perlu dilakukan perbaikan/ rehabilitasi, 18 % sarana Prasarana SMP juga perlu perbaikan dan hampir sebagian besar SD belum memiliki Laboratorium IPA, SMP tersedi 34 % telah memiliki Laboratorium IPA, demikian halnya dengan Perpustakaan SD baru 17,36 % dan SMP 26,32 %.

c. Pendidikan Menengah

Jenjang SMA/SMK/MA di kabupaten Pasaman dari 12 Kecamatan yang ada pada tahun 2015 telah didirikan SMA/SMK dan telah beroperasi. Secara rinci jumlah sekolah Jenjang SMA/MK dan MA di Kabupaten Pasaman

SMA berjumlah 14 sekolah, SMK 7 sekolah, MA 14 sekolah, indikator pencapaian APK 82,0 % dan APM 81,0 %.

Tabel 6. Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan kabupaten Pasaman jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B, SMA/SMK/MA/Paket C

NO	Indikator Kinerja Program	Tahun 2011	Capaian tahun 2015
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI Paket A	107,0	100,30
2	Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI Paket A	92,98	95,60
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/MTs, Paket B	78,56	97,06
4	Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs,Paket B	61,57	85,90
5	Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/SMK/MA, Paket C	52,54	82,0
6	Angka Partisipasi Murni (APM)SMA/SMK/MA, Paket C	41,05	81,0

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi yang melaksanakan kewenangan di bidang pendidikan harus melaksanakan pencapaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang ada di Indonesia yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan Pendidikan dan
8. Standar Penilaian Pendidikan.

Kedelapan Standar Nasional Pendidikan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Pasaman. Tantangan

Pembangunan Pendidikan perlu mendapat perhatian khusus meskipun keberhasilan pendidikan hingga tahun 2015 sudah terlihat nyata dengan menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya partisipasi penduduk yang berusia 7 hingga 18 tahun untuk melanjutkan pendidikan, serta meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan. Namun, masih banyak permasalahan yang dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang perlu mendapat perhatian seperti uraian berikut ini

1. Layanan Akses Paud yang berkualitas.

Tantangannya antara lain upaya meningkatkan akses paud terutama untuk masyarakat miskin, meningkatkan kompetensi guru, guru pendamping, dan pengasuh PAUD melalui pendidikan dan pelatihan. Serta meningkatkan koordinasi antarsektor dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD.

2. Pemenuhan Hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas

Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dilakukan dengan cara diantaranya meningkatkan manajemen penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dan mengelola Kartu Indonesia Pintar bagi masyarakat yang tidak mampu secara tepat guna, serta mmfasilitasi afirmasi khusus kepada anak di daerah 3T dan berkebutuhan khusus.

3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Peningkatan Kualitas pembelajaran meliputi Penguatan penjaminan mutu di Kabupaten Pasaman, penguatan kurikulum dan penilaian pendidikan.

4. Peningkatan Keterampilan Kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa (dikmas)

a. **Peluang**

SWOT Analisa Internal dan Eksternal

KEKUATAN (<i>Strengths</i>)		KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)	
S1	Peran utama lembaga dalam pembangunan pendidikan	W1	Tenaga Aparatur, Pendidik dan tenaga Kependidikan yang masih belum merata
S2	Motivasi dan etos kerja Aparatur, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang cukup tinggi	W2	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja aparatur
S3	Jumlah sumber daya Aparatur, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara kuantitas mencukupi	W3	Kesenjangan kuantitas dan kompetensi aparatur, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
S4	Fasilitas pendukung kerja cukup memadai	W4	Belum sebandingnya antara volume pekerjaan dengan fasilitas penunjang pekerjaan
S5	Masih banyak hasil UKG guru dibawa rata-rata nasional	W5	
S6	Belum terpenuhinya persyaratan profesional Kepsek/Pegawas satuan pendidikan	W6	Peningkatan profesional Kepsek/ Pengawas melalui diklat profesional
PELUANG (<i>Opportunities</i>)		TANTANGAN (<i>Threats</i>)	
O1	Terpenuhinya kelembagaan sekolah pendidikan dasar	T1	Terbatasnya daya tampung beberapa jenjang pendidikan
O2	Peningkatan kualifikasi pendidik semua jenjang pendidikan	T2	Masih adanya tenaga pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi
O3	Pemberian sertifikasi tenaga pendidik	T3	Masih adanya tenaga pendidik yang belum menerima tunjangan profesi

O4	Pembangunan pendidikan berkarakter	T4	Masih rendahnya pemahaman karakter bangsa
O5	Pengembangan metode pembelajaran melalui e-pembelajaran	T5	Masih adanya satuan pendidikan yang belum memiliki media pembelajaran yang lengkap

Matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

<p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Internal</p>	<p>PELUANG (<i>Opportunities</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya kelembagaan sekolah pendidikan dasar 2. Peningkatan kualifikasi pendidik semua jenjang pendidikan 3. Pemberian sertifikasi tenaga pendidik 4. Pembangunan pendidikan berkarakter 5. Pengembangan metode pembelajaran melalui e-pembelajaran 	<p>TANTANGAN (<i>Threats</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya daya tampung semua jenjang pendidikan 2. Masih adanya tenaga pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi 3. Masih adanya tenaga pendidik yang belum menerima sertifikasi 4. Masih rendahnya pemahaman karakter bangsa 5. Masih adanya satuan pendidikan yang belum memiliki komputer
	<p>KEKUATAN (<i>Strengths</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran utama lembaga dalam pembangunan pendidikan 2. Motivasi dan etos kerja aparatur, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang cukup tinggi 	<p>Strategi Kekuatan - Peluang (<i>S-O</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan. 2. Meningkatkan dan mengem-bangkan kualitas sistem laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. 3. Meningkatkan dan

<p>3. Jumlah sumber daya aparatur, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara kuantitas mencukupi</p> <p>4. Fasilitas pendukung kerja cukup memadai</p>	<p>mengem-bangkan kualitas data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan kebijakan pembangunan serta pelaporan.</p> <p>4. Mengembangkan sistem informasi yang dapat mendukung efektifitas pelaksanaan kinerja.</p>	<p>pelaksanaan kinerja.</p> <p>3. Meningkatkan hubungan kerja internal yang didukung oleh motivasi dan etos kerja yang tinggi.</p>
<p>KELEMAHAN (Weaknesses)</p> <p>1. Tenaga aparatur, pendidik dan tenaga kependidikan yang masih kurang</p> <p>2. Keterbatasan anggaran</p> <p>3. Belum sebandingnya antara volume pekerjaan</p> <p>4. Kesenjangan kuantitas dan kompetensi aparatur, pendidik dan kependidikan</p>	<p>Strategi Kelemahan - Peluang (W-O) :</p> <p>1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dinas pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lebih profesional.</p> <p>2. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel.</p> <p>3. Menata pegawai sesuai dengan bidang kompetensinya.</p> <p>4. Membangun sistem manajemen kinerja agar optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.</p>	<p>Strategi Kelemahan-Tantangan (W-T) :</p> <p>1. Menyediakan tenaga pendidik yang potensial dan kompeten dengan distribusi yang merata.</p> <p>2. Mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>3. Terpenuhinya formasi pekerjaan sebanding dengan jumlah PNS</p> <p>4. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas aparatur pendidik dan tenaga kependidikan</p>

BAB III

ISI-ISU STRATEGIS, BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi, tetapi ikut mempengaruhi kinerja organisasi dalam merumuskan langkah-langkah yang strategis. Menyikapi hal demikian analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE) sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen terkait, terutama bagaimana memetakan aturan/kebijakan agar sinkron dengan kondisi dan tingkat kepentingan. Oleh karena itu dalam menentukan tingkat keberhasilan harus pula disertai dengan tingkat kesiapan fungsi secara sistemik melalui kajian analisis.

a. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman yang mempengaruhi terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang didalamnya mencakup (1) sumber daya aparatur; (2) sarana dan prasarana; dan (3) organisasi kelembagaan. Rincian kekuatan dan kelemahan lingkungan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan

- a. Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Pasaman secara bersinambungan, efektif-efisien dan bersinerji menuju arah sasaran peningkatan mutu dan pemenuhan standar nasional pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, terukur dan terkendali. Hal ini telah dibuktikan dengan diraihnya prestasi kejuaraan baik dalam penguasaan materi akademis maupun non akademis seperti prestasi olahraga, akademis dan prestasi lainnya baik individu maupun kelambagaan ditingkat nasional maupun internasional.
- b. Adanya perbaikan yang terus menerus dari seluruh jajaran pendidikan di Kabupaten Pasaman untuk mendukung dan memantapkan program Pasaman Cerdas yang dirumuskan dalam visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman yaitu Mewujudkan Masyarakat Insan Pasaman yang Cerdas, Berakhlak dan Berdaya saing guna mendukung Kabupaten Pasaman sebagai Kabupaten Pasaman 2021 dengan misi menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu, meningkatkan sarana dan prasana pendidikan yang berwawasan lingkungan, meningkatkan profesionalisme dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mengembangkan Pendidikan Karakter menuju *good governance* melalui manajemen pendidikan yang akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja.
- c. Tersedianya sumberdaya aparatur kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan, Hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada yang siap untuk menjalani tantangan pembangunan pendidikan.

2. Kelemahan

Dalam penyelenggaraan bidang Pendidikan juga tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah pemahaman bagi masyarakat tentang arti pentingnya Pendidikan. Dalam kehidupan social, masih muncul berbagai permasalahan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai akibat belum stabilnya kondisi Ekonomi yang mengakibatkan banyaknya anak rawan dan putus sekolah, faktor budaya yang sangat kental mempengaruhi perilaku anak disamping masih terdapat anak-anak yang masuk usia sekolah tapi enggan untuk bersekolah.

Di sisi lain peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan masih perlu mendapat perhatian yang cukup serius, mengingat daya tampung siswa saat ini masih belum memenuhi akan kenyamanan dan ketenangan dalam proses belajar mengajar. Sementara itu Otonomi Daerah telah merangsang perubahan aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan cakupan layanan pendidikan. Kemampuan Guru dan tenaga kependidikan untuk mengemban tugasnya secara profesional melalui pelatihan – pelatihan masih perlu ditingkatkan. Pembangunan pendidikan didalamnya mencakup tujuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, guru, metoda pembelajaran, dan murid. Permasalahan pendidikan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya mencapai IPM 80 adalah :

a. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Akses dan pemerataan pendidikan adalah :

- (1) Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah yang ada;
- (2) Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;

b. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan adalah :

- (1) Kurang meratanya kualitas kemampuan profesionalisme guru dalam strategi, metode dan evaluasi pembelajaran, belum dapat

memfasilitasi siswa dalam meningkatkan kompetensi siswa secara berkelanjutan.

- (2) Terdapat kesenjangan dalam fasilitas sarana penunjang pembelajaran pendidikan yang bermutu, yaitu belum merata pada seluruh sekolah, seperti perpustakaan dan laboratorium serta media pembelajaran.
- (3) Belum terpenuhinya kesejahteraan minimal guru;
- (4) Belum baiknya disiplin guru dalam melaksanakan tugas,
- (5) Media belajar siswa dan media penampilan hasil belajar dan kreativitas siswa belum mendapat perhatian baik di setiap sekolah.
- (6) Kebijakan dan implementasi kebijakan pengembangan perpustakaan sekolah sebagai media belajar masih lemah.
- (7) Kendali mutu kendali pembelajaran melalui efektivitas kinerja pengawas pembina dan kepala sekolah perlu dikembangkan melalui penetapan kebijakan bersama yang terprogram,

c. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah:

- (1) Kurangnya perhatian sekolah dalam mawadahi siswa yang berprestasi;
- (2) Pembelajaran kepada siswa dalam meningkatkan kompetensi masih bersifat klasikal;
- (3) Kurangnya pembinaan siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
- (4) Pergeseran nilai-nilai karakter, agama, kebangsaan dan budaya dikalangan peserta didik yang menjadi isu nasional saat ini

d. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Efisiensi pendidikan adalah :

- (1) Kemampuan manajerial Kepala Sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah,

- (2) Belum optimumnya kegiatan kelompok kerja kepala sekolah., kelompok kerja guru KKG/MGMP, Kelompok kerja pengawas sekolah (KKPS/MKPS) dalam kegiatan supervisi kinerja;
- (3) Mutu Pelayanan Administratif bidang kurikulum, sarana pendidikan, dan bidang pengembangan profesi belum optimum.
- (4) Kebijakan ke arah pengembangan budaya belajar melalui pengembangan sekolah sebagai organisasi belajar masih lemah.
- (5) Pengembangan inovasi dalam memenuhi kebutuhan perkembangan siswa terdapat permasalahan seperti :
 - (a) Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengawasan hal ini disebabkan karena: Belum adanya tenaga fungsional khusus pendataan; Kurang sadar dan tanggapnya aparat terhadap pentingnya kehadiran data bagi perencanaan dan pengawasan; Belum terbangunnya sarana dan mekanisme pendataan yang efisien dan efektif yang berbasis teknologi informasi sebagai sumber data primer; Kurangnya dukungan dana operasional dan alat transportasi untuk pendataan;
 - (b) Sistem perencanaan yang berkembang dalam bentuk penyusunan rencana strategik dan program tahunan pada tingkat kabupaten maupun tingkat sekolah belum berkembang baik;
 - (c) proses pelaksanaan tugas yang berbasis perencanaan masih sangat lemah;
 - (d) sekolah kurang dapat berfungsi optimal sebagai wahana belajar yang terencana;
 - (e) sistem evaluasi dapat berfungsi sebagai bahan perbaikan belajar-mengajar dan manajemen pelaporan untuk pengembangan data pada tingkat sekolah masih sangat lemah;

- (f) permasalahan dalam bidang manajemen pendidikan adalah, tidak jelasnya konsep otonomi daerah dibidang pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999, masih tingginya peran dan ketergantungan dengan pemerintah pusat dalam masalah-masalah teknis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
- (g) masih rendahnya kinerja manajemen birokrasi pendidikan, kurang tersedianya data pendidikan yang mutakhir dan akuntabel yang bias dijadikan acuan bagi perencanaan dan pengendalian program pendidikan;
- (h) Verifikasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Sekolah belum melibatkan seluruh stake holders sekolah secara transparan, serta belum optimumnya dalam pengelolaan administrasi keuangan sekolah, lebih ditingkatkan partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan yang dikelola dengan baik, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dana yang berasal dari masyarakat;
- (i) pengelolaan bantuan keuangan terhadap sekolah maupun siswa perlu terpantau dengan baik untuk meningkatkan pemberdayaan dana secara efektif;
- (j) belum optimalnya fungsi Komite Sekolah dan Dewan Sekolah untuk meningkatkan mutu pengorganisasian yang lebih efektif;
- (k) standar mutu kinerja personal dan lembaga belum ditetapkan sebagai bagian dari program lembaga yang juga tercermin dalam implementasi kegiatan dan evaluasi.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal adalah faktor-faktor diluar lembaga kedinasan yang ikut mempengaruhi dan mewarnai terhadap kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Pasaman. Faktor-faktor luar termaksud adalah situasi dan kondisi politik, ekonomi,

sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggoblal.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman terpilih adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasaman yang Sejahtera, Agamis dan Berbudaya”

Berdasarkan visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan serta Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia, dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Meningkatkan Pendapatan dan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam serta Pengembangan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Penanganan Bencana yang Terpadu dan Berkualitas;
5. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Terpercaya;
6. Mengembangkan dan Melestarikan Nilai-nilai Budaya Daerah serta Membangun Karakter Masyarakat.

Menyikapi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Renstra harus mempersiapkan perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik baik itu pendidikan formal maupun non formal. Dalam Renstra ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Perluasan dan pemerataan pendidikan formal, kesempatan belajar dengan biaya murah pada anak usia dini dan kesempatan belajar 9 tahun.
2. Penyusunan kurikulum muatan lokal yang berbasis pada kultur dan potensi daerah.
3. Pengembangan dan peningkatan pendidikan non formal untuk menambah keterampilan hidup dan kemandirian berwirausaha.
4. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru/tenaga pendidik pada sekolah umum dan pesantren/madrasah diniyah.
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pendidikan secara berkelanjutan.

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Provinsi

1) Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”

- (1) Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
- (2) Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
- (3) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
- (4) Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
- (5) Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas, Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Mencermati visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman harus menyelaraskan rencana strategis dengan mempersiapkan antara lain :

- a. Tersedianya dan terjangkuanya layanan Paud bermutu dan berkesetaraan.

- b. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan;
- c. Berkembangnya budaya daerah melalui kesenian di sekolah.

2) Telaahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan draf RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, visi pembangunan jangka menengah yaitu “**Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera**”. Misi pembangunan jangka menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat & berbudaya berdasarkan falsafah ABS-SBK.
2. Meningkatkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif & berdaya saing regional dan global, menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi pariwisata unggulan, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dari lima (5) misi tersebut diatas yang terkait dengan prioritas pembangunan daerah terhadap sektor pendidikan yaitu terdapat pada misi ke satu (1) yaitu Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat & berbudaya berdasarkan falsafah ABS-SBK dan misi ke tiga (3) yaitu Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi tersebut adalah :

1. Misi 1 yaitu Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat & berbudaya berdasarkan falsafah ABS-SBK.

Tujuannya yaitu Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis,

beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan.

2. Misi 3 yaitu Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.

tujuan yaitu:

- a. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter.
- b. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat.
- c. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat.
- d. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis terlihat bahwa pola penggunaan tanah/wilayah di Kabupaten Pasaman dititik beratkan pada perumahan pemukiman, pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, kesejahteraan, industri, pertanian, hutan dan sebagainya. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Pasaman tahun 2010-2030 bab I pasal 1 ayat 22 dijelaskan bahwa Kawasan Strategis Kabupaten atau disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Selanjutnya diketahui bahwa sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berhubungan dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis adalah bidang sosial adalah pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan ini bertujuan untuk menampung masyarakat usia pra sekolah, usia sekolah maupun usia pasca sekolah.

Pembangunan sarana dan prasarana sekolah dibangun di wilayah/daerah sentra pemukiman sesuai dengan tata ruang wilayah yang ada. Target pembangunan didasarkan akan kebutuhan lembaga, tata ruang dan kepadatan masyarakat.

Penentuan lokasi sarana dan prasarana pendidikan dilakukan melalui tahapan-tahapan. Dengan tahapan-tahapan tersebut sehingga apabila dibangun sarana dan prasarana pendidikan tidak bersentuhan dengan kawasan hutan lindung/cagar alam. Dalam hal ini berdirinya bangunan sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Adanya permasalahan dalam pelayanan pendidikan dan memperhatikan telaah Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, Renstra Kemendikbud, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan tata ruang wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman selama lima tahun kedepan antara lain adalah :

1. Menyediakan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran nonformal dan informal berkualitas yang merata di seluruh kecamatan;

2. Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional, dan transparan;
3. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Mempercepat implementasi program hak belajar 9 tahun dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk memperluas pemberian subsidi pendidikan melalui program Pendidikan Gratis;
5. Melaksanakan kerjasama bidang pendidikan, kewirausahaan dan kecakapan hidup dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
6. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal, nonformal dan informal berkualitas tanpa membedakan status sosial-ekonomi, gender, dan wilayah;
7. Mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif, inovatif dan kontekstual dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama, dan kewirausahaan baik pada peserta didik, maupun masyarakat;
8. Pelaksanaan pemberantasan buta aksara usia 15 – 59 tahun;
9. Menyediakan data dan informasi pendidikan baik di sekolah formal, non formal dan pondok pesantren;
10. Pengembangan bela negara, akhlak mulia dan kecakapan hidup pemuda baik di sekolah formal, non formal dan pondok pesantren;
11. Menyediakan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata;

12. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal dan nonformal berkualitas yang merata di seluruh kecamatan;
13. Menyelenggarakan *multigrade teaching* di daerah terpencil terutama di sekolah satu atap;

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi

Arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman dirumuskan berdasarkan tantangan dan kondisi yang ada saat ini sehingga apa yang telah dirumuskan di dalam visi tersebut dapat dijadikan pedoman ataupun pandangan dalam menentukan arah dan strategi kebijakan dimasa yang akan datang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas utama membentuk sumber daya manusia yang akan dipersiapkan untuk menjadi generasi penerus, melalui proses pendidikan yang bermutu akan melahirkan generasi yang cerdas dan berdaya guna tanpa mengenyampingkan pengetahuan keagamaan dan budaya.

Merujuk kepada visi pembangunan Kabupaten Pasaman 2016 – 2021 yang mengamanahkan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasaman yang Sejahtera, Agamis dan Berbudaya, agar sejalan dengan cita-cita pembangunan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman telah merumuskan Visi tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Terwujudnya Insan Pasaman Yang Cerdas, Berakhlak dan Berdayasaing

Visi di atas menunjukkan adanya tiga tujuan yang hendak dicapai yakni mengupayakan terwujudnya Insan Pasaman yang Cerdas, Insan yang berakhlak dan insan yang berdaya saing dengan uraian sebagai berikut :

INSAN YANG CERDAS : Insan yang cerdas baik spiritual, sosial maupun intelektual dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, cerdas dalam menyikapi perkembangan arus globalisasi sosial, ekonomi, politik dan pembangunan yang serba kompleks saat ini dan siap untuk bersaing baik Regular, Nasional maupun Internasional.

INSAN YANG BERAKHLAK : Insan yang memiliki seluruh perilaku, sikap, perbuatan, adab dan sopan santun sesuai dengan tuntunan ajaran agama dengan penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (**Agamis**) dan selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran dan keadilan dalam mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan (**Berbudaya**).

INSAN YANG BERDAYA SAING : Insan yang memiliki motivasi diri untuk dapat memenangi suatu kompetisi, lebih berprestasi, berupaya lebih baik dari orang lain di sekitarnya. Insan yang memiliki daya saing tinggi, akan selalu berupaya bekerja lebih baik, tahan menghadapi berbagai kondisi, hambatan dan dapat menyesuaikan dengan lingkungan bekerjanya.

4.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum terkait upaya untuk mencapai terwujudnya visi. Dalam rangka pencapaian visi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman telah dirumuskan misi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan

serta Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Misi 2 : Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun, Pendidikan Non Formal (PNF), informal, kerkebutuhan Khusus dan Akademi komunitas

Misi 3 : Meningkatkan mutu pendidikan melalui fasilitas kompetensi dan kualifikasi pendidik (guru) dan tenaga kependidikan serta penigkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran.

Misi 4 : Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah melalui revitalisasi, promosi, penggalian dan pendokumentasian serta peningkatan kapasitas pelaku budaya

4.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan pembangunan di bidang pendidikan periode 2016 -2021 yang dijabarkan pada setiap misi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan serta Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Tujuan :

1. Meningkatkan Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Sasaran :

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat

melelalui penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun Pendidikan Non Formal (PNF), informal, Berkebutuhan Khusus dan Akademi komunitas

Tujuan :

1. Meningkatkan Pelayanan dan Pemerataan Pendidikan Masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.
2. Meningkatnya layanan pendidikan.
3. Meningkatnya pemerataan pendidikan.

Misi 3 : Meningkatkan mutu pendidikan melalui fasilitas kompetensi dan kualifikasi pendidik (guru) dan tenaga kependidikan serta penigkatan kualitas pembelajaran

Tujuan :

1. Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya mutu pendidikan.
2. Meningkatnya karakter dan integritas peserta didik.
3. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca.

Misi 4 : Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah melalui revitalisasi, promosi, penggalian dan pendokumentasian serta peningkatan kapasitas pelaku budaya

Tujuan :

1. Meningkatkan Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya peran dan penguatan adat dan lembaga adat dalam tata kehidupan masyarakat
2. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat, seni dan budaya dalam masyarakat.

1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi merupakan suatu rujukan penting dalam suatu perencanaan kegiatan organisasi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Disamping strategi, hal penting lainnya adalah penentuan arah kebijakkan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan stretegi yang dipilih agar lebih terarah dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk kurun lima tahun kedepan.

Perencanaan strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan usulan dari setiap bidang teknis sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI: Mewujudkan Insan Pasaman yang Cerdas, Berakhlak dan Berdayasaing			
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Keimanan Dan Ketaqwaan Serta Pemahaman Dan Pengamalan Ajaran Agama			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN

<p>1. Tujuan 1: Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa</p>	<p>Sasaran 1 : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat</p>	<p>1. Meningkatkan pemahaman agama melalui penumbuhkembangan lembaga pendidikan agama dan peningkatan kapasitas Imam Khatib, Muballigh, Ulama, Ustadz/Ustadzah, Pemuda Remaja Masjid dan organisasi sosial keagamaan</p>	<p>1. Menumbuhkan kembangkan pendidikan keagamaan di sekolah dan lembaga pendidikan Keagamaan 2. Menjadikan Program Tahfidz Qur'an sebagai bagian dari ekstrakurikuler pada setiap jenjang pendidikan</p>
<p>MISI 2: Meningkatkan tingkat Pendidikan Masyarakat melalui penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun, pendidikan non formal, informal, berkebutuhan khusus dan akademi komunitas.</p>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>1. Tujuan 1: Meningkatkan Pelayanan dan Pemerataan Pendidikan Masyarakat</p>	<p>Sasaran 1: Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat</p>	<p>1. Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun Pendidikan Non Formal (PNF), Informal, Berkebutuhan Khusus dan Akademi Komunitas</p>	<p>1. Penyelenggaraan Wajib Belajar 9 tahun. 2. Peningkatan Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF), Informal, Berkebutuhan Khusus dan Akademi Komunitas. 3. Penyediaan bantuan untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat mengikuti dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi</p>

	<p>Sasaran 2: Meningkatnya layanan pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan layanan pendidikan melalui PAUD, Pendidikan Dasar dan Partisipasi Masyarakat 2. Meningkatkan Tata Kelola pendidikan melalui pengelolaan data pendidikan dan kemitraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan angka partisipasi PAUD dan Pendidikan Dasar 2. Fasilitasi layanan pendidikan tingkat menengah 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 4. Peningkatan ketersediaan data berbasis teknologi informasi 5. Peningkatan kemitraan antara Pemerintah dengan Lembaga/Stakeholder Pendidikan
--	--	--	--

	Sasaran 3: Meningkatnya pemerataan pendidikan	1. Meningkatkan pemerataan pendidikan melalui ketersediaan sarana prasarana, pemerataan guru dan tenaga kependidikan	1. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan 2. Peningkatan pemerataan dan distribusi guru 3. Peningkatan ketersediaan dan kesejahteraan pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (pengawas sekolah, kepala sekolah, pustakawan, laboran, tenaga administrasi sekolah)
MISI 3. Meningkatkan mutu pendidikan melalui fasilitas kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pembelajaran.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan : Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya mutu pendidikan	Meningkatkan mutu pendidikan melalui fasilitasi kompetensi dan kualifikasi pendidik (guru) dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pembelajaran	1. Peningkatan fasilitasi kompetensi dan kualifikasi pendidik (guru) dan tenaga kependidikan 2. Peningkatan kualitas pembelajaran dan penerapan kurikulum pendidikan 3. Peningkatan akreditasi sekolah

	<p>Sasaran 2:</p> <p>Meningkatnya karakter dan integritas peserta didik</p>	<p>Meningkatkan karakter dan integritas peserta didik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan Penguatan mutu pembelajaran yang berorientasi pada pendidikan karakter/budi pekerti yang terintegrasi 2. Pengembangan budaya sekolah yang kondusif , berkarakter dan berintegritas
--	--	---	--

	<p>Sasaran 3:</p> <p>Meningkatnya minat baca dan budaya membaca</p>	<p>Meningkatkan minat baca dan budaya membaca melalui peningkatan kapasitas SDM, jangkauan dan ketersediaan sarana prasarana pendukung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan efektifitas dan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas, 2. Peningkatan kuantitas sarana & prasana dan keberagaman koleksi perpustakaan (cetak/elektronik/digital) termasuk naskah kuno 3. Peningkatan jangkauan layanan perpustakaan, 4. Peningkatan jumlah SDM pustakawan yang bersertifikasi
--	--	--	--

MISI 4. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah melalui revitalisasi, promosi, penggalian dan pendokumentasian serta peningkatan kapasitas pelaku budaya.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Tujuan 1:</p> <p>Meningkatkan Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah</p>	<p>Sasaran 1:</p> <p>Meningkatnya peran dan penguatan adat dan lembaga adat dalam tata kehidupan masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran dan penguatan adat melalui peningkatan kompetensi pemangku adat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran dan fungsi pemangku, lembaga dan masyarakat adat 2. Peningkatan kompetensi pemangku adat

	<p>Sasaran 2: Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat, seni dan budaya dalam masyarakat</p>	<p>2. Meningkatkan peran dan penguatan lembaga adat melalui fasilitasi, koordinasi dan ketersediaan sarana prasarana</p> <p>1. Melestarikan kebudayaan daerah melalui penggalian dan pendokumentasian warisan budaya</p>	<p>1. Peningkatan fasilitasi dan ketersediaan sarana prasarana pendukung kegiatan lembaga adat dan lembaga pendidikan adat yang representatif</p> <p>2. Revitalisasi dan pengembangan warisan budaya dan sejarah daerah sebagai pendukung pengembangan pariwisata</p> <p>3. Peningkatan pengembangan promosi dan event kebudayaan baik lokal, nasional dan internasional</p> <p>4. Peningkatan kualitas dan kapasitas pelaku dan organisasi seni budaya</p>
			<p>5. Menjadikan Bonjol sebagai kawasan wisata dan etalase kebudayaan, destinasi wisata (sejarah, budaya, alam, religi) dan edukasi</p>

		<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan penggalan, pendokumentasian dan publikasi warisan budaya2. Peningkatan peran serta perantau (dalam dan luar negeri) dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan Daerah
--	--	--

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Matrik renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berisikan indikator kinerja program dan kegiatan, data capaian pada tahun 2016, target kinerja program dan rencana pendanaan untuk tahun 2017 – 2021 dan kondisi kinerja pada akhir periode renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Matrik program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tahun 2016-2021 yang disertai kebutuhan dana/ pagu indikatif seperti dalam table V-1 sebagai berikut:

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dapat dilihat dalam tabel VI-1 berikut ini: